

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan terkait Prinsip Ekonomi Nasional dan Hak Penguasaan Negara.....	11
1. Prinsip Ekonomi Nasional.....	11
2. Hak Penguasaan Negara.....	12
B. Tinjauan terkait Hilirisasi Mineral dan Upaya Transformatif Super Prioritas.....	14
1. Tinjauan terkait Hilirisasi Mineral	14
2. Tinjauan Upaya Transformatif Super Prioritas pada Hilirisasi Mineral dan tantangan pelaksanaan Hilirisasi Mineral di Indonesia	25
C. Tinjauan tentang Penanam Modal Asing.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Sifat dan Jenis Penelitian	30
B. Data dan Bahan Penelitian	32
C. Cara dan Teknik Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Bentuk Upaya Transformatif Super Prioritas pada pelaksanaan Hilirisasi Mineral di Indonesia dan Aturan-Aturan Hilirisasi Mineral yang berlaku saat ini di Indonesia	42
1. Bentuk Upaya Transformatif Super Prioritas pada Pelaksanaan Hilirisasi Mineral di Indonesia.....	42
a. Data Sumber Daya dan Cadangan Mineral Utama Nasional.....	44
b. Rencana Pengelolaan Pertambangan Pada Kementerian ESDM (2022-2027) dan Rancangan Peta Jalan Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama (2021-2045)	67
c. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional pada Pada Kementerian Perindustrian berupa Penahapan Pembangunan Industri Logam Dasar dan Galian Bukan Logam (2015-2035).....	74
d. Perbandingan Pengelolaan Tambang di Indonesia dan pada Beberapa Negara Lain	80
2. Aturan-Aturan Hilirisasi Mineral yang berlaku saat ini di Indonesia :.....	89
a) Mineral Kritis Nasional	89
b) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB Tahunan)	90
c) Pengutamaan Kebutuhan Dalam Negeri	91
d) Perizinan Berusaha, Jangka Waktu Perizinan dan Jaminan Perpanjangan IUP/IUPK Operasi Produksi	92
e) Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah di dalam Negeri dan Larangan Ekspor Bahan Mentah Tambang	99
f) Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian.....	101

g) Perkembangan Aturan Relaksasi Izin Ekspor Bahan Mentah Tambang dan Produk Hasil Pengolahan dan Pemurnian di Indonesia.....	107
h) Pendirian Fasilitas Pemurnian (<i>Smelter</i>) dan Rekomendasi Ekspor Produk Hasil Pengolahan dan /atau Pemurnian	116
i) Jaminan Kesungguhan pendirian <i>Smelter</i>	123
j) Denda keterlambatan pembangunan <i>Smelter</i>	125
k) Jaminan Fasilitas Pemanfaatan Produk Hasil Pemurnian	127
l) Pendirian Fasilitas Pemurnian “ <i>Stand Alone</i> ” yang merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian.....	127
m) Mekanisme penerbitan Izin Ekspor Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian pada Kementerian Perdagangan	130
n) Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Produk Pengolahan dan/ Pemurnian Mineral	140
o) Harga Patokan Ekspor (HEP).....	144
p) Kewajiban Biaya Perpajakan dan Bukan Pajak Pertambangan Mineral.....	146
q) Fasilitas/Insentif Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) dalam pelaksanaan Hilirisasi Mineral di Indonesia	150
r) Divestasi.....	158
s) <i>Judicial Review</i> Pasal 169A Undang Undang No. 3 Tahun 2020.....	165
B. Penerapan Aturan Hilirisasi Mineral sebagai Upaya Tranformatif Super Prioritas Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia.....	166
1. Pelaksanaan Hilirisasi Mineral pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia	166
2. Pelaksanaan Hilirisasi Mineral pada PT Freeport Indonesia.....	175
3. Tantangan Pelaksanaan Hilirisasi Mineral Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia	201
4. Tantangan Pelaksanaan Hilirisasi Mineral di Indonesia Terhadap Gugatan Dari Negara-Negara Anggota WTO.....	205

5. Analisis Penerapan Aturan Hilirisasi Mineral dari sisi Kepastian Hukum dan Keadilan.....	214
BAB V PENUTUP	228
A. Kesimpulan	228
B. Saran	229
DAFTAR PUSTAKA	230
LAMPIRAN-LAMPIRAN	241